



**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025**

**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

*Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 No.563 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 357569, 351451 Faks. (0711) 377250 Kode Pos: 30129
E-mail: bun_plg@yahoo.co.id, Website: <http://disbun.sumselprov.go.id>*

BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, menyatakan bahwa Dinas Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 53 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, pada Dinas Perkebunan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 8 tahun 2018 tentang pembentukan, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, untuk membantu pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kerjanya Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dibantu 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu:

1. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP),
2. UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP).

1. Tujuan

Dinas perkebunan menetapkan tujuan jangka menengah yaitu meningkatkan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan. Ada empat komoditas utama perkebunan yang menjadi perhatian penting karena memiliki luasan yang cukup besar. Adapun komoditas tersebut adalah Kopi, Karet, Kelapa dan Kelapa Sawit.

2. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan pada pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan areal produksi perkebunan
- 2) Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan
- 3) Meningkatkan perlindungan perkebunan
- 4) Dukungan kesekretariatan untuk meningkatkan produksi perkebunan.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Meningkatkan Areal Produksi Perkebunan	Perluasan Areal Perkebunan	Mendorong Pengembangan Lahan-Lahan yang tidak dimanfaatkan
			Mendorong peningkatan investasi di sektor perkebunan
		Optimalisasi Lahan Perkebunan Yang Kurang Produktif	Melakukan rehabilitasi tanaman perkebunan yang kurang produktif
			Melakukan Diversifikasi tanaman existing dengan tanaman tanaman lain
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan	Meningkatkan Penggunaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan alat dan mesin perkebunan agar menjadi lebih efektif
			Meningkatkan serta melakukan pengawasan ketersediaan dan penggunaan benih unggul
			Meningkatkan ketersediaan sarana air dalam mendukung peningkatan produktivitas tanaman
		Meningkatkan Penanganan Panen sesuai Standar Anjuran	Meningkatkan kemampuan SDM dan kelembagaan perkebunan
			Mendorong peningkatan sistem pengolahan sesuai anjuran
	Meningkatkan Perlindungan Perkebunan	Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan bencana di sektor Perkebunan	Meningkatkan serta melakukan pengawasan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman
			Mencegah serta meminimalisir gangguan usaha dan konflik usaha perkebunan

3. Belanja APBD Program/Kegiatan/Sub kegiatan

Pagu anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 29.937.699.984,-** dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi	: Rp. 29.216.012.094,-
◆ Belanja Pegawai	: Rp. 11.544.829.000,-
◆ Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 17.671.183.094,-
Belanja Modal	: Rp. 721.687.890,-
◆ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 341.687.890,-
◆ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp. 380.000.000,-

Pagu anggaran sebesar Rp. 29.937.699.984,- terdiri atas 6 program, 15 kegiatan dan 31 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
 - b. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanam
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
 - 3) Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
 - c. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
- 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya
- 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian Oranisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 2) Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

5. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penerapan standar dan izin Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
 - b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis kawasan
 - 1) Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan kelembagaan Korporasi Petani

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Meningkatnya Areal Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan Luas Tanaman Menghasilkan (%)	0,39	0,40	0,41
			Meningkatnya luas areal perkebunan (Ha)	2.960.000	2.965.000	2.970.000
		Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan	Produktivitas Karet (Ton/Ha/Thn)	1,47	1,48	1,50
			Produktivitas Kelapa Sawit (Ton/Ha/Thn)	3,54	3,55	3,56
			Produktivitas Kopi (Ton/Ha/Thn)	0,94	0,95	0,96
			Produktivitas Kelapa (Ton/Ha/Thn)	1,18	1,19	1,20
			Jumlah Benih Unggul yg beredar (Benih)	17.000.000	17.250.000	17.500.000
			Persentase peningkatan prasarana perkebunan (%)	13,70	13,75	13,80
			Meningkatnya pengawasan perusahaan perkebunan (unit)	316	316	316
			Persentase petani yang tergabung dalam pengolahan pemasaran bersama (%)	24,10	24,15	24,20
			Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan (kelompok)	92	93	94
			Nilai Tukar Petani (Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat)	115,10	115,15	115,20
		Meningkatnya perlindungan	Luas areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan gangguan usaha (Ha)	650	750	850
		Dukungan Kesekretariatan untuk meningkatkan produksi perkebunan	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100

Beberapa Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan juga menjadi bagian Indikator Kinerja Daerah yang tercantum dalam RPJMD, yaitu:

1. Produktivitas Karet (Ton/Ha/Tahun),
2. Produktivitas Kopi (Ton/Ha/Tahun),
3. Produktivitas Kelapa Sawit (Ton/Ha/Tahun), dan
4. Produktivitas Kelapa (Ton/Ha/Tahun).

5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)

Pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2025 berdasarkan kewilayahan tersebar di beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Program/kegiatan/sub kegiatan rutin dan operasional kantor pelaksanaannya di wilayah Kota Palembang.
- b. Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang di Kabupaten Empat Lawang.
- c. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme di Kabupaten Banyuasin
- d. Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian di Kabupaten Musi Rawas, OKU Selatan, Lahat, OKU, dan Kabupaten OKU Timur
- e. Sub kegiatan lainnya akan dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota.

B. Latar Belakang Penyusunan Laporan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang akurat dan objektif kepada pihak yang membutuhkan, meningkatkan akuntabilitas serta sebagai alat evaluasi terhadap capaian program/kegiatan/sub kegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk:

1. Mendorong transparansi dalam pelaksanaantugas pokok dan fungsi organisasi kepada pemangku kepentingan
2. Menilai capaian target kinerja yang telah ditetapkan diawal perencanaan kerja
3. Menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan kedepan
4. Menjadi bahan dalam identifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi.

BAB II.
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD TRIWULAN III
TAHUN 2025

A. Realisasi Belanja APBD

Tabel 3. Realisasi Belanja APBD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	
		KEUANGAN (Rp)	(%)
BELANJA OPERASI	29.216.012.094	18.405.719.801	63,00
- Belanja Pegawai	11.544.829.000	7.427.269.712	64,33
- Belanja Barang dan Jasa	17.671.183.094	10.978.450.089	62,13
BELANJA MODAL	721.687.890	720.878.835	99,89
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.000.000	379.190.945	99,79
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	341.687.890	341.687.890	100,00
TOTAL BELANJA	29.937.699.984	19.126.598.636	63,89

B. Indikator Kinerja OPD

Tabel 4. Realisasi capaian perjanjian kinerja (IKU) sampai Triwulan III Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian (%)	Faktor Penghambat / Pendorong
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Areal Produksi Perkebunan	Persentase peningkatan luas tanaman menghasilkan	%	0,40	0,35	87,50	Data adalah angka sementara
		Meningkatnya luas areal perkebunan	Ha	2.965.000	2.849.225	96,10	Data adalah angka sementara
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan	Produktivitas Karet	Ton/Ha/Thn	1,48	1,20	81,08	Data adalah angka sementara
		Produktivitas Kelapa Sawit	Ton/Ha/Thn	3,55	3,45	97,18	Data adalah angka sementara
		Produktivitas Kopi	Ton/Ha/Thn	0,95	0,94	98,95	Data adalah angka sementara
		Produktivitas Kelapa	Ton/Ha/Thn	1,19	1,16	97,48	Data adalah angka sementara
		Jumlah Benih Unggul yg beredar	Benih	17.250.000	10.715.318	62,12	Data adalah data sampai Bulan Juni
		Persentase peningkatan prasarana perkebunan	%	13,75	-	-	Baru bisa dihitung diakhir tahun
		Meningkatnya pengawasan perusahaan perkebunan	Unit	316	-	-	Baru bisa dihitung diakhir tahun
		Persentase petani yang tergabung dalam pengolahan pemasaran bersama	%	24,15	-	-	Baru bisa dihitung diakhir tahun
		Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan	Kelompok	93	-	-	Baru bisa dihitung diakhir tahun
		Nilai Tukar Petani Perkebunan	%	115,15	143,82	135,21	Sumber data: press release Berita Resmi Statistik BPS Sumatera Selatan
	Meningkatnya Perlindungan Perkebunan	Luas areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan gangguan usaha	Ha	750	38.206	> 100	banyak dilakukan oleh masyarakat secara swadaya
	Dukungan Kesekretariatan untuk meningkatkan produksi perkebunan	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	50	50	

C. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah

Penghargaan yang diraih Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sepanjang triwulan III tahun 2025 yaitu:

- ✓ Penghargaan PARITRANA AWARD TAHUN 2024, penghargaan atas perlindungan 19.023 petani/pekebun sawit di Sumatera Selatan.

BAB III.

KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Kendala yang dihadapi sepanjang triwulan III tahun anggaran 2025 yang sangat mempengaruhi adalah adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksana kegiatan harus menyusun kembali rencana pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatannya.

Tindak lanjutnya adalah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

BAB IV. PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Perkebunan sepanjang triwulan III Tahun Anggaran 2025. Semoga laporan ini dapat membantu memantau progres pelaksanaan kegiatan secara berkala sehingga memudahkan dalam mengevaluasi kinerja dan pencapaian target. Dan adanya evaluasi secara berkala ini dapat membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Palembang, 06 Oktober 2025

Plt. **KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



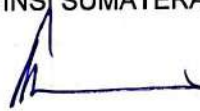
HERDI APRIANSYAH, S.STP., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19760425 199412 1 001

BAB IV. PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Perkebunan sepanjang triwulan III Tahun Anggaran 2025. Semoga laporan ini dapat membantu memantau progres pelaksanaan kegiatan secara berkala sehingga memudahkan dalam mengevaluasi kinerja dan pencapaian target. Dan adanya evaluasi secara berkala ini dapat membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Palembang, 06 Oktober 2025

Pit. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



✓ **HERDI APRIANSYAH, S.STP., M.M.**
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19760425 199412 1 001

LAPORAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (IKU DAN IKD)
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian (%)	Faktor Penghambat / Pendorong
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Areal Produksi Perkebunan	Perentase peningkatan luas tanaman menghasilkan	%	0,40	0,35	87,50	Data adalah angka sementara
		Meningkatnya luas areal perkebunan	Ha	2.965.000	2.849.225	96,10	Data adalah angka sementara
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan	Produktivitas Karet	Ton/Ha/Thn	1,48	1,20	81,08	Data adalah angka sementara
		Produktivitas Kelapa Sawit	Ton/Ha/Thn	3,55	3,45	97,18	Data adalah angka sementara
		Produktivitas Kopi	Ton/Ha/Thn	0,95	0,94	98,95	Data adalah angka sementara
		Produktivitas Kelapa	Ton/Ha/Thn	1,19	1,16	97,48	Data adalah angka sementara
		Jumlah Benih Unggul yg beredar	Benih	17.250.000	10.715.318	62,12	Data adalah data sampai Bulan Juni
		Persentase peningkatan prasarana perkebunan	%	13,75	-	-	Baru bisa dihitung diakhir tahun
		Meningkatnya pengawasan perusahaan perkebunan	Unit	316	-	-	Baru bisa dihitung diakhir tahun
		Persentase petani yang tergabung dalam pengolahan pemasaran bersama	%	24,15	-	-	Baru bisa dihitung diakhir tahun
		Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan	Kelompok	93	-	-	Baru bisa dihitung diakhir tahun

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian (%)	Faktor Penghambat / Pendorong
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nilai Tukar Petani Perkebunan	%	115,15	128,71	111,78	Sumber data: press release Berita Resmi Statistik BPS Sumatera Selatan
	Meningkatnya Perlindungan Perkebunan	Luas areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan gangguan usaha	Ha	750	38.206	> 100	banyak dilakukan oleh masyarakat secara swadaya
	Dukungan Kesekretariatan untuk meningkatkan produksi perkebunan	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	75	75	

Palembang, 06 Oktober 2025

Pt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HERDI APRIANSYAH, S.STP., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19760425 199412 1 001

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian (%)	Faktor Penghambat / Pendorong
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nilai Tukar Petani Perkebunan	%	115,15	128,71	111,78	Sumber data: press release Berita Resmi Statistik BPS Sumatera Selatan
	Meningkatnya Perlindungan Perkebunan	Luas areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan gangguan usaha	Ha	750	38.206	> 100	banyak dilakukan oleh masyarakat secara swadaya
	Dukungan Kesekretariatan untuk meningkatkan produksi perkebunan	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	75	75	

Palembang, 06 Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

HERDI APRIANSYAH, S.STP., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19760425 199412 1 001

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2025**

Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	75	15.563.852.324	9.612.702.161	61,76	59,50	APBD			
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Dokumen	5	5	130.500.000	53.696.347	41,15	33,18	APBD			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	4	115.000.000	50.046.347	43,52	44,00	APBD	Disbun		
2.	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	15.500.000	3.650.000	23,55	50,00	APBD	Disbun		
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	-	11.871.829.000	7.527.209.712	63,40	62,22	APBD			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	792	-	11.544.829.000	7.427.269.712	64,33	65,00	APBD	Disbun		
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	5	-	327.000.000	99.940.000	30,56	30,78	APBD	Disbun		
C.	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Tersedianya Perlengkapan Kebutuhan Kantor	Tahun	1	-	164.275.550	164.275.550	100	100	APBD			
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	134.989.550	134.989.550	100	100	APBD	Disbun		
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	2	29.286.000	29.286.000	100	100	APBD	Disbun		
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor	Paket	1		612.500.000	117.355.365	19,16	24,56	APBD			

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Paket	1	-	32.500.000	4.592.800	14,13	14,20	APBD	Disbun		
2.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	-	245.000.000	49.642.241	20,26	25,00	APBD	Disbun		
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	-	25.000.000	2.835.500	11,34	25,00	APBD	Disbun		
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	3	-	20.000.000	300.000	1,50	30,00	APBD	Disbun		
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	150	-	290.000.000	59.984.824	20,68	25,00	APBD	Disbun		
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan yang Tersedia	Paket	1	-	341.687.890	341.687.890	100	100	APBD			
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	241.900.000	241.900.000	100	100	APBD	Disbun		
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-			-	-		di efisiensi
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	35	35	99.787.890	99.787.890	100	100	APBD	Disbun		
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Penunjang ADM Perkantoran	Tahun	1	-	1.408.059.884	738.713.881	52,46	73,99	APBD			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	-	20.000.000	5.500.000	27,50	28,00	APBD	Disbun		
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang tersedia	Laporan	12		600.000.000	265.515.881	44,25	45,00	APBD	Disbun		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Laporan	24	-	788.059.884	467.698.000	59,35	60,00	APBD	Disbun		
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Tahun	1	-	1.035.000.000	669.763.416	64,71	58,24	APBD			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	90	-	800.000.000	473.402.950	59,18	60,00	APBD	Disbun		
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	-	45.000.000	16.536.500	36,75	37,00	APBD	Disbun		
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	-	190.000.000	179.823.966	94,64	95,10	APBD	Disbun		
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkat Luas Tanaman Menghasilkan	Tahun	1	-	3.141.299.560	1.489.840.811	47,43	51,20	APBD			
A.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan sarana pertanian	Kab/Kota	17	-	1.118.878.960	690.921.840	61,75	55,80	APBD			
1.	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	Laporan	4	-	1.118.878.960	690.921.840	61,75	63,00	APBD	Kab. Musi Rawas, OKUS, Lahat, OKU, OKUT		
B.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanam	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat	Tahun	1	-	1.891.375.000	744.783.371	39,38	38,28	APBD			
1.	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	4.100	-	130.000.000	48.443.524	37,26	38,00	APBD	Kab/kota		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Benih Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 Tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan	1	-	125.000.000	19.529.742	15,62	17,00	APBD dan DBH-CHT	Kab/kota		
3.	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah Benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang	batang	125.000	-	1.636.375.000	676.810.105	41,36	42,00	APBD	Kab. Empat Lawang		
C.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Meningkatnya Menejemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Tahun	1	-	131.045.600	54.135.600	41,31	41,00	APBD			
1.	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan Mikroorganisme	Laporan	1	-	131.045.600	54.135.600	41,31	42,00	APBD	Kab/kota		
III.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penuhulan	Kab/Kota	17	-	228.125.000	213.706.979	93,68	3,00	APBD			
A.	Penataan Prasarana Pertanian				-	228.125.000	213.706.979	93,68	3,00	APBD			
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	4	-	28.125.000	14.340.000	50,99	52,00	APBD	Kab/kota		
2.	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	-	200.000.000	199.366.979	99,68	100,00	APBD	Disbun		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Peningkat Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Tahun	1	-	534.985.000	168.019.275	31,41	34,55	APBD			
A.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Meningkatnya Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Kab/Kota	17	-	534.985.000	168.019.275	31,41	34,55	APBD			
1.	Pengendalian Oranisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	550	-	404.645.000	121.252.225	29,97	30,00	APBD	Kab/kota		
2.	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ha	200	-	130.340.000	46.767.050	35,88	37,00	APBD	Kab/kota		
V	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	40	-	37.900.000	23.405.814	61,76	62,50	APBD			
A.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Izin Usaha Pertanian	Kab/Kota	17	-	37.900.000	23.405.814	61,76	62,50	APBD			
1.	Pembinaan dan Pengawasan penerapan standar dan izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian Yang Dibina dan diawasi	Laporan	18	-	37.900.000	23.405.814	61,76	62,50	APBD	Kab/kota		
VI	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kab/Kota	17	-	10.431.538.100	7.618.923.596	73,04	47,00	APBD			
A.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Persentase Pelaksanaan	tahun	1	-	10.381.138.100	7.594.634.722	73,16	47,00	APBD	Disbun		
1.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	93	-	10.381.138.100	7.594.634.722	73,16	74,00	APBD dan DBH Sawit	17 kab/kota		

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis kawasan	Meningkatnya Pembentukan kelembagaan Korporasi Petani	Kab/Kota	17	-	50.400.000	24.288.874	48,19	50,00	APBD			
1.	Pembentukan dan Penguatan kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	1	-	50.400.000	24.288.874	48,19	50,00	APBD	Kab/kota		
	Jumlah Program: 6 Jumlah Kegiatan: 15 Jumlah Sub Kegiatan: 31			-		29.937.699.984	19.126.598.636	63,89	64,67				

Palembang, 06 Oktober 2025

**PIC. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

HERDI APRIANSYAH, S.STP., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19760425 199412 1 001

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis kawasan	Meningkatnya Pembentukan kelembagaan Korporasi Petani	Kab/Kota	17	-	50.400.000	24.288.874	48,19	50,00	APBD			
1.	Pembentukan dan Penguatan kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	1	-	50.400.000	24.288.874	48,19	50,00	APBD	Kab/kota		
	Jumlah Program: 6 Jumlah Kegiatan: 15 Jumlah Sub Kegiatan: 31			-		29.937.699.984	19.126.598.636	63,89	64,67				

Palembang, 06 Oktober 2025

Pt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

HERDI APRIANSYAH, S.STP., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19760425 199412 1 001